



Bab 14

Quo Vadis Moderasi Beragama di Indonesia

Winarto Eka Wahyudi

“Mereka, yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan”. Aforisme ini konon berasal dari Ali ibn Abi Thalib saat menyampaikan pesan kepada Gubernur Mesir Malik bin al-Harits an-Nakha’i atau yang lebih dikenal Malik al-Asytar. Wasiat ini merupakan pesan agar dalam kepemimpinannya, sang Gubernur memperlakukan warganya yang non-muslim dengan semangat keadilan (*equality*) dan spirit egalitarian dalam hak dan kewajiban. Aforisme Ali ini memiliki relevansi dengan *kredo* yang dimiliki oleh bangsa kita: “Bhinneka Tunggal Ika”. Satu semangat kesatuan dan spirit kebersamaan yang menyatukan semua elemen. Sebuah *common platform* yang mempertemukan beragam karakter sosio-kultural manusia. Dalam tradisi keberagaman pemeluk Nasrani, barangkali

W. E. Wahyudi

Universitas Islam Lamongan, *e-mail*: ekawahyudi1926@unisla.ac.id

© 2023 Editor & Penulis

Wahyudi, W. E. (2023). Quo vadis moderasi beragama di Indonesia. Dalam M. L. Maknun, S. Kurniawan, & W. E. Wahyudi (Ed.), *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital* (393–400). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.904.c750 E-ISBN: 978-623-8372-27-0

semangat ini lebih dikenal sebagai ajaran “Kasih Tuhan”, atau dalam tradisi pemeluk Buddha secara *ghalib* dikenal sebagai *dharma*.

Nalar kemanusiaan inilah yang menjadi pilar penting konsep moderasi beragama dalam buku ini. Melalui program akuisisi pengetahuan lokal yang diinisiasi oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN, karya ini menjadi *quo vadis?* akademik yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman empiris para penulisnya dalam merefleksikan moderasi beragama pada berbagai aspek kehidupan, baik pada segmentasi nalar kebudayaan, dinamika sosial, basis teologi, maupun ekspresi dalam ruang virtual. Setidaknya hal inilah yang tergambar pada tulisan-tulisan yang telah tersusun secara apik dalam buku ini.

Moderasi beragama menjadi satu narasi yang penting untuk selalu disuarakan, apalagi Indonesia merupakan negara multikultur, multietnis dan multireligi paling kaya di dunia. Selain menjadi sebuah aset, kekayaan ini tentu saja juga bisa menjadi api dalam sekam (Ahnaf et al., 2015). Jika keliru dalam pengelolaannya, bisa berpotensi menimbulkan konflik yang mengerikan. Simpulan ini bukan isapan jempol belaka. Mengingat Indonesia memiliki sejarah kelam konflik etnis dan agama, potensi disintegrasi bangsa menjadi satu keniscayaan yang patut untuk dihindari atau diminimalkan. Dalam konteks moderasi ini, kekayaan Indonesia terletak pada spirit ke-bhineka-an. Sebuah perasaan kebersamaan dalam perbedaan.

Di sisi lain, kita harus mengakui bahwa moderasi menjadi satu istilah atau nomenklatur konseptual yang sukar didefinisikan. Hal ini karena ia menjadi satu term, yang dewasa ini, diperebutkan pemaknaannya (*highly contested concept*) oleh berbagai kalangan dan komunitas di masyarakat. Ia dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati dan dipahami. Jika kita melihat definisi moderat pada kamus bahasa Inggris, akan menemukan kata *moderate* yang bermakna

- 1) *average in amount, intensity, quality, etc; not extreme* (rata-rata dalam jumlah, intensitas, kualitas; tidak ekstrem);

- 2) *of or having (use political) opinions that are not extreme* (pandangan politik yang tidak ekstrem, misalnya pandangan politik yang tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan);
- 3) *keeping or kept within limits that are not excessive* (menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan) (Hornby 1994).

Dalam tradisi pemikiran keagamaan, derajat moderasi paham keberagaman sering kali dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan konteks lokalitas masing-masing. Sekalipun secara generik konsep moderasi memiliki kerangka pikir yang relatif sama, ia berimplikasi pada pemaknaan yang beragam jika dikaitkan dengan konteks lokalitas tertentu. Misalnya, konsep moderasi di Amerika Serikat (AS) akan berbeda pemaknaannya dengan yang berlaku di Indonesia. Ekspresi moderasi di AS sering kali dipahami secara tumpang-tindih dengan mereka yang mendukung demokrasi, HAM, paham sekularisme, kebijakan AS tentang *war on terror*, dan semacamnya. Di kalangan media AS, kalangan muslim moderat sering kali diindikasikan sebagai kelompok yang pro-Barat, baik dalam visi politiknya maupun pemikiran keagamaannya, yang acapkali kritis. Sementara itu, istilah Islam moderat sering kali dipakai secara peyorasi sebagai satu kelompok yang visi keagamaannya sekuler dan secara normatif kurang islami. Muslim moderat di Amerika Serikat adalah mereka yang menerapkan versi Islam yang lebih lunak—semacam ke-islamannya John Esposito, Irshad Manji, dan Karen Armstrong—yang mau hidup secara berdampingan dengan nonmuslim dan merasa nyaman dengan demokrasi serta pemisahan agama dan negara (Hilmy 2012).

Namun, hal ini berbeda dengan di Indonesia. Konsep moderasi sering kali dipahami sebagai pemikiran dan paham keagamaan yang tidak mengadopsi dua kutub pemikiran, yaitu pemikiran liberal Barat di satu sisi dan pemikiran ekstrem radikal di sisi lain (Islam and Khatun 2016). Kelompok moderat terletak di antara kedua kutub tersebut. Meskipun demikian, secara generik, konsep moderasi bermakna jalan tengah atau pilihan di antara dua kutub ekstremitas pemikiran keagamaan (*middle-path* atau *middle-way*).

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh para penulis, dalam buku ini, kita menemukan *sorotan* penting dalam diskursus moderasi beragama, yaitu dari mana dan akan ke mana ia dibawa dalam konteks ke-Indonesia-an. Premis moderasi beragama yang secara eksplisit terkandung dalam kumpulan tulisan buku ini dapat dikategorikan menjadi sembilan dalil pokok moderasi *ala* Indonesia.

Pertama, moderasi beragama memiliki akar teologi yang kuat dalam cakrawala berpikir masyarakat Indonesia. Spirit keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan menjadi nilai universal yang terkandung pada tiap-tiap agama. Dengan demikian, moderasi bukan monopoli ajaran satu agama tertentu, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan yang bersifat inheren dari “titah langit” itu sendiri. Pemilihan diksi *Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam Pancasila merupakan frasa yang nyaris tanpa perlawanan kelompok keagamaan di Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi jejak genius bagaimana para *founding fathers* membangun fondasi keberagamaan moderat masyarakat Nusantara sejak negara ini masih berupa orok.

Kedua, moderasi beragama meniscayakan satu pengetahuan yang komprehensif. Ia merupakan nilai yang hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki kepekaan nalar dan logika yang sehat. Sebaliknya, moderasi akan menjadi satu nilai yang *vis a vis* dengan mereka yang hanya mengandalkan “semangat beragama” tanpa memperdalam paham keagamaan, kepekaan sosial, dan semangat kebangsaan. Keseimbangan di antara berbagai elemen ini akan melahirkan satu tesis bahwa makin religius seseorang dapat dipastikan akan menjadi makin moderat.

Ketiga, moderasi, sebagai sebuah nilai, meniscayakan satu instrumen untuk mengartikulasikannya ke dalam tataran yang lebih praktis. Ekspresi moderasi agama dapat menjadi nilai dari *personal being* dan *social being* apabila didukung oleh infrastruktur sosial dan budaya. Tradisi yang berkembang di masyarakat serta produk kebudayaannya menjadi bagian yang cukup penting dalam mentransmisikan nilai-nilai moderasi ke dalam *stock of knowledge* masyarakat.

Keempat, moderasi beragama mengandaikan satu pemahaman bahwa semua pemeluk agama adalah manusia. Oleh karena itu, kesadaran atas kemanusiaan harus berjalan secara serentak dan serempak dengan kesadaran beragama. Jangan sampai pemeluk agama justru abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena radikalisme dan terorisme serta tindakan intoleransi, yang menggejala dalam rentetan sejarah selama ini, merupakan bukti kegagalan pemeluk agama untuk menjadi manusia seutuhnya.

Kelima, menjadi seorang pemeluk agama yang moderat berarti harus mampu membuang pemikiran keagamaan yang sempit, kaku, dan *rigid*. Mereka harus piawai mendialogkan teks-teks suci agama dengan tantangan dan kondisi zaman tempat mereka berada. Pengontekstualan ajaran agama dalam lanskap kehidupan bermasyarakat meniscayakan pemikiran yang terbuka dan mampu berdialog dengan berbagai perbedaan karakter yang ada.

Keenam, moderasi beragama bukan berarti mendekonstruksi dan mereduksi ajaran agama sehingga harus tunduk terhadap tren yang sedang berkembang. Ruang dialektika antara agama dan kondisi sosial tidak harus menghilangkan keyakinan yang asasi sebagai pemeluk agama. Hal itu bukan berarti juga bahwa atas nama hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan kemudian menghilangkan jati diri dan norma-norma penting sebuah agama. Dengan demikian, menjadi moderat tidak lantas membenarkan agama lain, tetapi mampu menempatkan agama lain sebagai entitas yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya sebagai sesama pemeluk agama.

Ketujuh, kampanye moderasi harus menjadi narasi utama dalam konten dunia digital. Hal ini karena narasi-narasi keagamaan yang cenderung intoleran, bahkan menyentuh pada paham radikal sudah diproduksi melalui kanal-kanal media daring. Oleh sebab itu, di tengah menjamurnya wacana intoleransi, paham keagamaan moderat harus dijadikan sebagai upaya penangkal narasi intoleransi agar saluran informasi di media daring tidak sesak oleh bahasa dan diksi keagamaan yang keras.

Kedelapan, menjadi moderat berarti harus siap menjadi manusia yang adil sejak dalam pikiran. Ia mampu berpikir proporsional dan tidak apologetis serta fanatik terhadap kelompoknya sendiri. Dengan demikian, moderasi beragama mampu menyuarakan kebenaran walaupun kadang terdengar pahit. Ia bersedia dikoreksi oleh orang lain dan terbuka untuk dievaluasi oleh pihak mana pun. Ia berpikir di atas pijakan keadilan, bertindak atas dasar kemanusiaan, bersuara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, serta bersikap di atas fondasi keadaban dan moralitas.

Kesembilan, moderasi beragama harus diletakkan sebagai *kredo* gerakan dan tidak hanya dijadikan sebagai *asupan* ceramah akademik dan obyek kajian. Melalui tulisan yang ada dalam buku ini, moderasi beragama harus diartikulasikan melalui perilaku yang benar-benar dinyatakan dalam fenomena empiris. Keberagamaan moderat bukan satu entitas yang tergelantung di puncak menara gading. Ia berdenyut dengan kebudayaan masyarakat, mengendap dalam pemahaman rakyat, dan mengkristal melalui *lelaki* semua pemeluk agama yang dipersatukan dalam satu tarikan nafas *bhineka tunggal ika* dengan nuansa pemeluk agama masing-masing.

Kesembilan dalil pokok di atas, menjadi *quo vadis* moderasi beragama di Indonesia. Ia disarikan berdasar temuan-temuan penting dari dua belas tulisan yang disajikan oleh para penulisnya dalam buku ini. Para penulis terlihat begitu piawai meracik gagasan ideal tentang semangat moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui buku ini, nilai-nilai keberagamaan moderat merupakan fondasi penting dalam menyokong tegaknya masyarakat kosmopolitan yang menurut Arif (2012) ditandai ke dalam empat ciri pokok sebagai berikut.

Pertama, inklusif. Ini adalah keterbukaan diri terhadap *unsur luar* melalui kemampuan apresiasi dan seleksi secara konstruktif (Masroer 2018). *Kedua*, humanisme. Ini dimaknai sebagai cara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya,

bukan karena sebab lain, semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama, termasuk ke dalam humanisme adalah sifat egaliter, yang memandang semua manusia sama derajatnya. *Ketiga*, toleransi. Toleransi berarti adanya kelapangan dada dan kebesaran jiwa dalam menyikapi perbedaan. *Keempat*, demokrasi yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan penyampaian kritik.

Sikap sosial-keagamaan semacam itu jelas terlihat pada sikap dasar mayoritas umat Islam hingga sekarang kendatipun mungkin sebagai *silent majority* sehingga mereka mampu hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain atas dasar saling memahami, menghargai, dan mempercayai. Moderasi beragama inilah yang membekali kesiapan masyarakat Indonesia dalam mengarungi *global village* dengan segenap peluang dan tantangannya.

Dengan melihat kondisi sekarang ketika media sosial dan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, kajian moderasi beragama akan sangat baik jika dikembangkan ke arah peran penting platform media sosial dalam menyebarkan wacana positif moderasi beragama. Misalnya, ini bisa dilakukan dengan mengkaji relasi antara diskursus keagamaan dan media sosial atau ekspresi dan perilaku keberagamaan masyarakat maya. Ini juga bisa dilakukan dengan mengkaji moderasi beragama dalam perspektif analisis wacana untuk membedah produksi konten-konten narasi moderat yang tersebar di pelbagai platform media sosial. Hal penting lain adalah mengkaji interelasi antara keislaman, kebudayaan, dan platform digital dalam membangun kesadaran moderasi beragama berikut problem yang dihadapinya. Tentu saja dengan pesatnya teknologi informasi dan makin cairnya karakter kebudayaan akibat dari arus globalisasi, spektrum kajian moderasi beragama akan makin kompleks. Hal ini menuntut peran serta para akademisi dan peneliti untuk terus menyuarakan keberagamaan moderat melalui berbagai riset yang akan berkontribusi positif bagi peradaban Indonesia ke depan.

Daftar Referensi

- Ahnaf, M. I., Maarif, S., Afwan, B. A., & Afdillah, M. (2015). *Politik lokal dan konflik keagamaan: pilkada dan struktur kesempatan politik dalam konflik keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Arif, M. (2012). Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18. <http://dx.doi.org/10.14421/jpi.2012.11.1-18>
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia.” *Jurnal Miqot*, 36(2), 262–81. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Hornby, A. S. (1994). *Oxford advanced learner's dictionary*. Oxford university Press.
- Islam, T., & Khatun, A. (2016). Islamic moderation' in perspectives: A comparison between oriental and occidental scholarships.” *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2), 67–76. <http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v3i2.1414>
- Masroer, M. (2018). Religious inclusivism in Indonesia: Study of Pesantren An-Nida and Edi Mancoro, Salatiga, Central Java. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1): 1–23. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i1.1485>